



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHARNIS
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 34073

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.955.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 721 m²/72 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m²/110 m² di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m²/100 m² di KAB / KOTA PELALAWAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 180.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 94.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 565.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.795.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.795.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.